



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG ARIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **186688**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 958.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 168.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 94.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 27.650.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 12.285.912**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.092.235.912**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.092.235.912**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.